

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah, secara etimologis, berasal dari kata Yunani "kubernan" atau "nahkoda kapal", yang berarti menatap ke depan. Dalam konteks ini, "memerintah" berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara, serta memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang. Pemerintah juga berfungsi sebagai pengelola dan pengarah masyarakat ke tujuan yang ditetapkan, dengan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat.

Pemerintah adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Pemerintah yang berdaulat memiliki hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nasional, serta memiliki monopoli untuk melaksanakan kekuasaan yang bersifat memaksa dalam mengurus rumah tangga tersebut. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dan wilayah Negara, meningkatkan taraf hidup dan lingkungan hidup, memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Selain definisi di atas berikut ini terdapat pula definisi mengenai pemerintah yang dikutip dari Inu Kencana dalam bukunya Sistem Pemerintahan Indonesia sebagai pelengkap dalam membuka wawasan mengenai definisi pemerintah, yaitu:

1. Menurut W.S. Sayre

“Government is best as the organized agency of state, expressing and exercising authority.”

Pemerintah, dalam definisi terbaiknya, adalah organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

2. Menurut Wilson

“government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or references to the common affairs or the community.”

Pemerintah pada akhirnya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan yang tidak selalu terkait dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Pemerintah terdiri dari dua atau sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.

(Syafiie, 2011)

Dengan mengacu pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dapat diartikan sebagai badan-badan atau lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan pemerintahan, yang meliputi pelaksanaan serta semua ketentuan hukum. Badan atau lembaga tersebut akan melaksanakan wewenangnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Optimalisasi pelaksanaan wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah.

2.1.1.2 Pemerintahan

Untuk memahami definisi pemerintahan secara mendalam. Alangkah baiknya kita memahami mengenai apa yang dimaksud pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan berdasarkan menurut Talidzaha Nduruha bahwa:

“Pemerintahan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Badan atau organisasi yang berfungsi sebagai pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia, serta memastikan kesejahteraan masyarakat.” (Ndraha, 2015)

Berdasarkan pernyataan Talidzaha Ndraha bahwa pemerintahan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia serta masyarakat. Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minum, dan tempat tinggal. Pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dari ancaman dan bahaya.

Pemerintahan memiliki beberapa fungsi, seperti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem ketertiban dimana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar.

Pemerintahan juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Pemerintahan juga memiliki peranan dalam membangun daerah yang kondusif melalui otonomi. Otonomi adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejabaran bawah. Pemerintah daerah memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang salah satunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi daerah.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, pemerintahan sendiri dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), dari segi structural fungsional dan dari segi tugas dan wewenang :

1. Dalam dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan yang terorganisasi dan bersumber pada kedaulatan, serta berlandaskan pada dasar negara yang mengenai rakyat dan wilayah negara, dengan tujuan menciptakan tujuan negara.
 2. Dalam struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsi atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
 3. Dalam aspek tugas dan kewenangan Negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.
- (Subakti, 2010)

Berdasarkan definisi di atas, bahwa pemerintahan adalah suatu konsep yang memiliki beberapa aspek yang berbeda-beda. Dalam dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan yang terorganisasi dan bersumber pada kedaulatan, serta berlandaskan pada dasar negara yang mengenai rakyat dan wilayah negara. Tujuan dari pemerintahan adalah untuk menciptakan tujuan negara, yaitu untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara.

Dalam struktur fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang saling berhubungan secara fungsional. Fungsi-fungsi ini meliputi berbagai

aspek, seperti pemerintahan, hukum, keamanan, dan lain-lain. Fungsi-fungsi ini harus melaksanakan tugasnya atas dasar-dasar tertentu, seperti undang-undang dan peraturan, demi tercapainya tujuan negara.

Dalam aspek tugas dan kewenangan Negara, pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara. Tugas dan kewenangan ini meliputi berbagai aspek, seperti pemerintahan, hukum, keamanan, dan lain-lain. Pemerintahan harus melaksanakan tugas dan kewenangan ini dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, demi tercapainya tujuan negara

Dalam beberapa kasus, pemerintahan dapat berfungsi sebagai pengelola negara yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Pemerintahan juga memiliki peranan dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

2.1.2 Tinjauan Strategi

Pengertian tentang strategi dapat dihubungkan dengan suatu siasat dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Sebuah program akan terlihat berjalan dengan sistematis apabila telah dilakukan strategi yang tepat terhadap program tersebut. Menurut Heene, Aime, Desmidt, & Sebastian di dalam buku Manajemen Organisasi Strategi bahwa

“Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. “strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti pasukan.” (Heene, Aime, Desmidt, & Sebastian, 2015)

Strategi merupakan perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana

yang dimiliki. Dan pengertian lainnya yaitu “*a term that virtually every business person believes they know and understand*” (sebuah istilah yang hampir setiap orang bisnis percaya mereka tahu dan pahami) (O’Regan dan Ghobbadin,2002:22).

Disisi lain strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Stephanie K. Marrus 2001:31).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang dilakukan stakeholder institusi atau organisasi dengan sistematis , khususnya yang berkaitan dengan institusi negara guna menunjang program program dapat tercapai. Strategi merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan apa yang dicapai.

Definisi strategi lainnya dijelaskan menurut Alfred Chandler Jr. (2009) dengan pengertian bahwa:

"The determination of a company's long-term goals and objectives, as well as the formulation of actions and allocation of resources required to achieve those goals and objectives." (Jr, 2009)

Penjelasan dari definisi atas bahwa strategi bukan hanya sekedar penetapan tujuan, tetapi juga proses merumuskan bagaimana tujuan akan dicapai melalui serangkaian tindakan terencana dengan mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Strategi adalah suatu peta jalan menyeluruh yang mengarahkan perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sebaik mungkin.. Pengertian lebih lanjut mengemukakan bahwa:

“a choice about how an organization will achieve its goals in a dynamic and unpredictable environment (Mintzberg,2010:51)

Definisi ini Organisasi harus mampu menyusun strategi yang luwes dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka meskipun dihadapkan pada lingkungan yang dinamis dan sulit diprediksi. Hal ini meliputi pendekatan yang berfokus pada pelibatan sumber daya manusia, pengembangan keterampilan dan pengetahuan.

2.1.3 Tinjauan Strategi Pemerintah

Strategi Pemerintah merupakan sebuah rencana yang akan dikerjakan oleh lembaga negara dalam jangka menengah atau jangka panjang. Menurut Suwarsono mengemukakan bahwa strategi memiliki tiga komponen yaitu:

1. Strategi Manajemen: Strategi ini berfokus pada pengelolaan sumber daya organisasi, seperti SDM, keuangan, dan fasilitas. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.
 2. Strategi Investasi: Strategi ini berfokus pada pengelolaan sumber daya organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk atau jasa. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan organisasi.
 3. Strategi Bisnis: Strategi ini berfokus pada pengelolaan organisasi sebagai sebuah bisnis, dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa.
- (Suwarsono, 2012)

berdasarkan penjelasan diatas, bahwa komponen strategi Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif, organisasi membutuhkan strategi yang solid untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Strategi manajemen menjadi pedoman utama bagi para pemimpin untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas secara efektif dan efisien, sehingga setiap potensi dapat dioptimalkan demi mencapai tujuan organisasi. Strategi investasi juga

berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya secara strategis, baik modal, teknologi, maupun talenta terbaik, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar dan meraih pendapatan yang lebih besar. Sementara itu, strategi bisnis menjadi peta jalan yang komprehensif bagi organisasi dalam mengelola seluruh aspek bisnisnya, mulai dari pemasaran, operasional, keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia, dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan melalui peningkatan kualitas dan pengelolaan bisnis yang efisien. Dengan mengintegrasikan ketiga strategi ini secara sinergis, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, mengembangkan keunggulan kompetitif, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memenangkan persaingan di pasar dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan didalam buku *the art of Public* mengemukakan “ *Public strategy is the systematic use of public resource and powers, by public agencies, to achieve public goals*” (Mulgan, 2009). Strategi yang dijelaskan oleh Geoff Mulgan bahwa penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik(pemerintah) oleh pemerintah untuk mencapai tujuan publik. dalam konteks ini, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan memanfaatkan berbagai instrumen yang dimilikinya, baik berupa sumber daya material maupun otoritas politik, untuk mengatasi permasalahan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut, konsep ini menekankan bahwa pemerintah, sebagai representasi kepentingan publik, memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan

aset-aset negara dan legitimasi politiknya dalam rangka menciptakan solusi yang efektif dan efisien bagi berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencakup proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan publik.

Menurut Geoff Mulgan untuk meraih tujuan publik. Pemerintah perlu memperhatikan sistem pada lima indikator sebagai berikut:

“Purposes, defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities. Environments, the context (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It’s from the interaction of these two that government and agencies then define their chosen. Directions, The goals and outcome that are desirable and achievable, as well as their relative priorities and sequencing. The in turn define. Actions, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected results, strategy also depends critically on: and Learnings, system for understanding not just which actions did or didn’t work but also whether there’s need to rethink purposes, analyses and chosen directions.
(Mulgan, 2009)

Berdasarkan pernyataan Geoff Mulgan, Bahwa Tujuan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik, tetapi juga merespon kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat.

Selanjutnya, lingkungan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi proses kebijakan. Ini mencakup analisis mendalam terhadap konteks saat ini dan proyeksi masa depan, serta evaluasi kapasitas yang dimiliki untuk mengatasi berbagai permasalahan. Interaksi antara tujuan dan lingkungan ini kemudian mengarah pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Penetapan arah kebijakan merupakan langkah berikutnya, di mana tujuan dan hasil yang diinginkan dirumuskan secara lebih spesifik. Proses ini melibatkan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan diambil. Aspek kepemimpinan yang inspiratif juga ditekankan di sini, mengindikasikan pentingnya kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan komitmen dari berbagai pihak.

Keseluruhan proses ini diarahkan untuk menciptakan nilai publik. Namun, terdapat pengakuan bahwa setiap tindakan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga. Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan harus fleksibel dan adaptif.

Akhirnya, elemen pembelajaran menjadi komponen integral dalam kerangka ini. Sistem pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada evaluasi keberhasilan atau kegagalan tindakan, tetapi juga mendorong peninjauan kembali terhadap tujuan, analisis, dan pilihan-pilihan yang telah dibuat. Ini mencerminkan pendekatan yang reflektif dan iteratif dalam proses kebijakan publik.

Kerangka konseptual ini menyajikan pandangan holistik tentang proses kebijakan publik, menekankan pentingnya pemahaman kontekstual, fleksibilitas, dan pembelajaran berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, pemahaman ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk menganalisis dan berpartisipasi dalam proses-proses kebijakan publik yang kompleks dan dinamis.

Berdasarkan pendapat Mulgan di atas, dijelaskan bahwa indikator strategi terdiri dari:

1. Tujuan: Menentukan tujuan yang sangat penting yang timbul dari kesenjangan antara kebutuhan, harapan, dan keresahan masyarakat dengan kenyataan sekarang. Tujuan ini didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat serta kenyataan sekarang untuk menentukan apa yang perlu diatasi. Tujuan ini meliputi dari misi dan kemampuan.

a) Misi, peneliti mengambil teori misi menurut Fred R David yaitu:

“statement describes the values and priorities of an organization. Developing a mission statement compels strategists to think about the nature and scope of present operations and to assess the potential attractiveness of future markets and activities.” (David, 2011)

Berdasarkan pernyataan Fred R David bahwa pernyataan yang menggambarkan nilai dan prioritas organisasi. Dalam konteks manajemen strategis, pernyataan misi memainkan peran penting dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Dalam proses membuat pernyataan misi, strategis harus berpikir tentang sifat dan luas operasi organisasi sekarang, serta mengevaluasi potensi daya tarik pasar dan kegiatan masa depan. Dengan demikian, pernyataan misi dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengarahkan organisasi menuju tujuan yang lebih jauh.

b) Kemampuan merupakan kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Peneliti mengambil teori kemampuan menurut Robbins bahwa kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. (Robbins & Judge, 2018).

Berdasarkan pengertian menurut Robbins diatas bahwa kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini meliputi kemampuan teknis, kemampuan sosial, dan kemampuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisiensi.

2. Lingkungan (*environments*), Lingkungan yang meliputi konteks sekarang dan masa depan serta kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Interaksi antara dua faktor ini membantu pemerintah dan lembaga-lembaga menentukan arah yang dipilih. Lingkungan ini meliputi: peluang dan sistem
 - a) Peluang, merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan (Pearce, 2014). Berdasarkan definisi tersebut lingkungan dalam kalimat ini merujuk pada faktor-faktor di yang dapat mempengaruhi pengelolaan wisata alam. dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata alam, meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung, serta menarik lebih banyak wisatawan. Strategi ini juga harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan agar wisata alam dapat berkelanjutan. Pemanfaatan peluang secara optimal akan mengelola wisata alam, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
 - b) Sistem kerja merupakan sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan sub sistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya

(Mulyani, 2016). Berdasarkan definisi diatas bahwa sistem kerja ini memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan wisata alam yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Pengarahan (*direction*), pemerintah dan lembaga-lembaga menentukan tujuan dan hasil yang diinginkan dan dapat dicapai, serta prioritas dan urutan yang relatif. Tujuan ini kemudian menentukan arah yang akan diambil. Peneliti menggunakan teori George R. Terry (2006) didalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen menjelaskan

“Usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.” (Terry, 2006)

Pada bagian ini ada terdapat 4 (empat) indikator pengarahannya, yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah.

- a) Koordinasi adalah menyesuaikan tugas atau pekerjaan dengan jalan yang dihubungkan guna menyelaraskan dengan bawahan. (Nawawi Z., 2013). bahwa semua sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, bekerja secara sinergi dan terinasi dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan wisata alam, seperti meningkatkan kunjungan wisatawan, melestarikan lingkungan alam, dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.
- b) Motivasi menurut Nawawi (2013) dengan pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. Dengan strategi motivasi yang

tepat, Organisasi dapat memastikan bahwa seluruh staf atau bawahan bekerja dengan semangat, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dalam upaya pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan dan memberikan pengalaman terbaik.

- c) Komunikasi menurut Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid (1931) dalam buku *Communication Network: Toward a New Paradigm for Research* bahwa komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Berdasarkan pendapat Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid Komunikasi adalah proses Komunikasi merupakan sebuah proses yang dinamis, di mana terjadi aliran informasi dari satu pihak ke pihak lain secara berkelanjutan. Komunikasi bukan hanya sekedar tindakan satu arah, tetapi melibatkan pertukaran dan timbal balik informasi.
- d) Perintah merupakan pemberi arahan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas pekerjaan mereka (Fayol, 2013). Bahwa Sebagai pemberi arahan, Organisasi Pemerintah bertanggung jawab dalam menyampaikan visi, misi, strategi, dan rencana kerja terkait pengelolaan kepada seluruh staf. Arahan ini dapat disampaikan melalui rapat koordinasi, pelatihan, atau sosialisasi secara berkala. Dengan adanya arahan yang jelas, staf dapat memahami peran mereka masing-masing dan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan.

4. Tindakan (*Action*), tindakan disini bahwa kepemimpinan yang menginspirasi untuk membujuk orang lain agar berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Bersama-sama, hal-hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai publik, tetapi karena semua tindakan memiliki hasil yang tidak terduga, strategi juga sangat bergantung pada pembelajaran. Pada indikator ini berkaitan dengan *descision making* (pengambilan keputusan) dan Sarana .
 - a) Pengambilan keputusan merupakan proses yang melibatkan serangkaian tahapan untuk memilih satu opsi terbaik dari berbagai pilihan alternatif yang ada dengan menggunakan pendekatan yang rasional dan logis, sehingga tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan. (Bowo, 2008). bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis, dimana seseorang atau organisasi harus mengevaluasi berbagai pilihan alternatif yang ada secara rasional dan logis untuk memilih opsi terbaik. Proses ini tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan, melainkan membutuhkan waktu dan pertimbangan yang matang.
 - b) Sarana merupakan Segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama untuk mencapai tujuan (Moenir, 2006). Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sarana sangat krusial untuk memudahkan dalam mencapai tujuan.
5. Pembelajaran (*Learning*), Sistem untuk memahami tidak hanya tindakan yang berhasil atau tidak berhasil, tetapi juga apakah perlu merenovasi tujuan, analisis, dan arah yang dipilih. Pengajaran ini sangat penting untuk

memperbaiki strategi dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Pembelajaran ini ada dua indikator yaitu metode perbandingan (*comparison method*) dan identifikasi (*Identification*).

- a) Metode Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas (Basah, 1994). Berdasarkan definisi menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan konsultasi pakar dalam konteks pengelolaan wisata alam. Metode ini membantu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, meningkatkan kebijakan dan perencanaan, mendorong kolaborasi, dan memberikan informasi untuk peningkatan layanan.
- b) Identifikasi, menurut Chaplin dalam Kartono(2008:8) menyatakan bahwa identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu. Berdasarkan definisi di atas bahwa konsep ini sangat penting dalam konteks pengelolaan pariwisata, khususnya dalam pengelolaan wisata alam, dimana pemahaman karakteristik wisatawan dan daya tarik wisata sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan yang efektif.

2.1.4 tinjauan Pengelolaan

Pengelolaan secara umum dipergunakan untuk menunjukkan sebuah proses Serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengatur, mengorganisir, dan mengarahkan upaya serta tenaga orang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi atau badan tertentu, serta membantu dalam merumuskan kebijakan dan tujuan strategis dari organisasi tersebut. Istilah dari pengelolaan berasal dari bahasa inggris yaitu manajemen

Manajemen merupakan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya (Terry, 1972). Pendapat ini juga menunjukkan bahwa Manajemen adalah rangkaian aktivitas yang meliputi merancang rencana, mengatur organisasi, memotivasi anggota, serta mengawasi jalannya operasi yang dilakukan untuk menetapkan dan mewujudkan tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

Secara praktis, pengelolaan merupakan usaha untuk menciptakan keteraturan. Dalam sebuah lembaga atau institusi, pengelolaan dipandang sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan oleh sebuah badan atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok agar dapat mengatasi permasalahan yang muncul. Menurut A. Goraph di dalam buku Manajemen Pemerintahan bahwa:

“Manajemen pemerintahan ialah suatu proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh

penguasa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
(A.Goraph, 2020)

Berdasarkan diatas bahwa Manajemen pemerintahan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi oleh para pemimpin pemerintahan. Aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk mengelola dan mengatur jalannya roda pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Para penguasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka harus merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan program yang akan dijalankan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap keputusan dan langkah yang diambil harus selalu berorientasi pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus memastikan penyediaan layanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan penegakan hukum yang adil.

Dengan menerapkan manajemen pemerintahan yang baik, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kebijakan dan program yang dijalankan harus tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun manajemen pemerintah meliputi sepuluh fungsi yaitu

1. "*Forecasting* (ramalan) yaitu kegiatan meramalkan, memproyeksikan rencana pemerintah terhadap kemungkinan yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan.
 2. *Planning* (perencanaan) yaitu penentuan pemerintah dalam serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
 3. *Organizing* (organisasi), yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal penetapan sebuah kebijakan.
 4. *Staffing* (penyusunan personalia) yaitu penyusunan personalia sejak dari perekrutan aparatur, latihan pengembangan sampai dengan usaha agar setiap personalia memberi daya guna maksimal pada instansi.
 5. *Directing* (pengarahan) yaitu usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan guna diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
 6. *Leading* (memimpin) yaitu pekerjaan seorang kepala instansi untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 7. *Coordinating* (koordinasi) yaitu menyesuaikan tugas atau pekerjaan dengan jalan yang dihubungkan guna menyelaraskan dengan bawahan.
 8. *Motivating* (motivasi) yaitu pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela.
 9. *Controlling* (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan organisasi.
 10. *Reporting* (pelaporan) yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan."
- (Nawawi Z. , 2013)

Berdasarkan poin-poin di atas Menurut Nawawi bahwa Menurut Nawawi, dalam menerapkan manajemen pemerintahan yang baik, pemerintah harus memulai dengan melakukan peramalan (*forecasting*) untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan terkait pelaksanaan program dan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah perlu menyusun perencanaan (*planning*) yang matang, mencakup penetapan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, dan program kerja dalam upaya mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), pemerintah harus membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada unit-unit kerja secara proporsional dan terintegrasi agar sumber daya dapat dioptimalkan. Pemerintah juga perlu melakukan penyusunan personalia (*staffing*) yang kompeten untuk mengisi posisi-posisi strategis di birokrasi.

Setelah itu, pemerintah perlu memberikan arahan (*directing*), bimbingan, dan petunjuk agar pelaksanaan tugas dan program sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan memimpin (*leading*) dari pimpinan pemerintahan untuk menggerakkan dan mempengaruhi bawahan agar bertindak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Pemerintah juga harus melakukan koordinasi (*coordinating*) untuk menyatukan dan menyelaraskan kegiatan unit-unit kerja agar terdapat keterpaduan dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah perlu memberikan motivasi (*motivating*) berupa dorongan, semangat, dan inspirasi kepada aparatur negara agar dapat bekerja dengan antusias dan dedikasi.

Dalam proses pelaksanaan program dan kebijakan, pemerintah harus melakukan pengawasan (*controlling*) untuk memantau, mengevaluasi, dan mengawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, pemerintah perlu melakukan pelaporan (*reporting*) dengan menyampaikan informasi hasil pelaksanaan program dan kebijakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti legislatif dan masyarakat.

Dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut secara optimal dan berkesinambungan, pemerintah dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.5 Tinjauan Wisata Alam

Kabupaten Bandung Barat memiliki destinasi wisata alam dengan 73 destinasi wisata. Bahwa retribusi kabupaten Bandung Barat 30% dari sektor Pariwisata. (Wijaya, 2017; Heene, Aime, Desmidt, & Sebastian, 2015) Pariwisata merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah guna mengenalkan budaya dan pemandangan alam dengan tujuan sebagai riset studi baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya ini tidaklah mudah, melainkan harus dikelola dengan secara baik oleh pemerintah, Masyarakat dan Swasta. Maka diperlukan namanya strategi untuk mensiasati pengelolaan pariwisata dengan baik. Sehingga permasalahan pariwisata di Indonesia terutama di Kabupaten Bandung Barat sendiri akan terselesaikan sedikit demi sedikit apabila penanggulangan melalui strategi pengelolaan wisata alam.

Pariwisata serapan dari bahasa Belanda yaitu *tourisme*. Dalam Definisi Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pariwisata bahwa kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

“Pariwisata adalah kegiatan perjalanan seseorang ke dan tinggal ditempat lain di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk waktu kurang setahun

kontinu dengan bertujuan bersenang bersenang,berniaga dan kegiatan yang lainnya (Warpani, 2007)”

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa ciri utama pariwisata adanya pergerakan atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bukan tempat tinggal tetap, serta menginap atau tinggal sementara di tempat tujuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Ini membedakannya dari kegiatan sehari-hari di tempat tinggal utama.

Pariwisata imbuhan dari kata wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu secara sukarela dan bersifat sementara dengan tujuan berlibur atau tujuan yang lainnya bukan untuk mencari nafkah (Warpani, 2007)

Hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian wisata diatas yaitu pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan secara sukarela, sementara waktu, ke tempat-tempat tertentu dengan motivasi berlibur atau kepentingan lain, bukan untuk bekerja atau mencari nafkah di tempat tujuan tersebut..

Menurut Yoetti (1998) paling tidak ada 4 (enam) faktor yang menjadi dasar pariwisata murni, yaitu:

1. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu, sekurang-kurangnya 24 jam dan kurang dari satu tahun;
2. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain;
3. Perjalanan itu, apapun bentuknya, harus selaly dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi;
4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah ditempat.
(Yoeti, 2008)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya faktor pariwisata, perjalanan tersebut didefinisikan sebagai aktivitas yang sementara, berlangsung antar lokasi,

dan tidak bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau pekerjaan, serta sepenuhnya terkait dengan tujuan rekreasi atau pengalaman pribadi.

Wisata merupakan sebuah tempat dikunjungi oleh wisatawan dengan bermaksud belajar ataupun bersenang-senang, serta mempelajari hal-hal baru yang mana tempat memiliki potensi destinasi wisata serta menjadikan mata pencaharian baru. Menurut Pasal 1 UU no 10 tahun 2009 tentang pariwisata bahwa:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

Wisata merupakan kegiatan perjalanan baik individu maupun kelompok dengan betujuan mengunjungi tempat dengan betujuan rekreasi, pengembangan diri serta mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara. Menurut Suwardjoko. P. Warpani (2007) makna wisata masih luas maka ada 12 (empat belas) kategori:

1. Wisata Agro merupakan jenis pariwisata yang memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata. Wisata agro memberikan pengalaman berwisata sekaligus memberikan pengetahuan tentang kegiatan pertanian dan kehidupan pedesaan.
2. Wisata belanja merupakan salah satu jenis pariwisata yang menjadikan kegiatan berbelanja sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Wisata belanja umumnya menawarkan berbagai fasilitas dan obyek wisata yang terkait dengan kegiatan jual beli barang dan jasa.
3. Wisata budaya Jenis wisata ini berhubungan dengan kebudayaan suatu masyarakat atau daerah, seperti mengunjungi situs bersejarah, museum, pertunjukan seni tradisional, festival budaya, dll.
4. Wisata Iklim merupakan Wisata yang memanfaatkan keunikan iklim suatu daerah sebagai daya tarik, misalnya berwisata di daerah tropis, kutub, gurun, dll.
5. Wisata Karya Jenis wisata yang mengapresiasi hasil karya seni dan budaya, seperti mengunjungi pameran seni, galeri seni, pertunjukan teater, konser musik, dll
6. Wisata Kesehatan Berwisata dengan tujuan untuk penyembuhan atau perawatan kesehatan, seperti ke sumber air panas, pusat spa, pusat rehabilitasi, dll

7. Wisata Konvensi Wisata yang berkaitan dengan kegiatan konferensi, seminar, pameran dagang, dan acara bisnis lainnya.
8. Wisata Niaga Berwisata dengan tujuan untuk melakukan transaksi bisnis atau perniagaan.
9. Wisata Olahraga Jenis wisata yang melibatkan aktivitas olahraga, seperti pertandingan olahraga, kamp latihan, atau olahraga rekreasi.
10. Wisata Pelancongan Wisata yang menikmati pemandangan alam, seperti pantai, gunung, hutan, dll.
11. Wisata Petualangan Wisata yang melibatkan aktivitas yang menantang dan membangkitkan adrenalin, seperti arung jeram, panjat tebing, wisata alam liar, dll.
12. Wisata Ziarah Jenis wisata yang mengunjungi tempat-tempat suci atau makam untuk tujuan spiritual atau keagamaan.
13. Darma wisata adalah jenis wisata yang dilakukan dengan tujuan khusus, seperti studi lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau kepentingan pekerjaan lainnya.
14. Widiawisata merupakan kunjungan yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, menggali ilmu, dan melakukan studi perbandingan. Istilah ini sering digunakan dalam dunia pendidikan.
(Warpani, 2007)

Wisatawan menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 dikotomi menjadi dua jenis wisatawan:

1. Wisatawan Nusantara adalah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata atau kunjungan sementara dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wisatawan Mancanegara, yang merupakan orang asing yang melakukan kunjungan sementara ke Indonesia di luar maksud berusaha atau bekerja.

Penjelasan wisatawan menurut UU nomor 10 tahun 2009 bahwa wisatawan Nusantara adalah warga negara Indonesia yang berwisata di dalam negeri, sedangkan wisatawan Mancanegara adalah warga negara asing yang berwisata ke Indonesia. Pemerintah wajib mengembangkan pariwisata nusantara agar mampu mendorong kunjungan wisatawan domestik ke destinasi-destinasi wisata di tanah air.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam strategi tentang pengelolaan wisata alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barat mengalami beberapa masalah, diantaranya minimnya *update* pada *website* serta penanganan belum maksimal dalam pengembangan infrastruktur.

Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan, maka peneliti menggunakan teori Strategi menurut Geoff Mulgan yang memiliki arti bahwa strategi berfokus pada mobilisasi kekuasaan dan pengetahuan untuk mencapai kebaikan bersama, dengan mengakui tantangan unik dan kompleksitas sektor publik. Pendekatannya menggabungkan model pembuatan strategi linier dengan pemahaman tentang proses sosial-politik yang membentuk strategi, menekankan pentingnya intuisi strategis dan peran politik dalam pembuatan strategi. dapat tercapai tujuannya jika lima indikator yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut berjalan sinergi satu sama lain. Menurut pendapat Geoff Mulgan dalam bukunya *The Art of Public Strategy* bahwa *Strategy* (strategi) terdiri dari *purpose* (tujuan), *environment* (lingkungan), *direction* (pengarahan), *action* (tindakan) dan *knowledge* (ilmu Pengetahuan (Geoff Mulgan 2009:4). Menurut Geoff Mulgan, Strategi memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi tujuan atau target yang diharapkannya, lingkungan, pengarahan, aksi dan kekuatan. Semakin baik tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

1. *Purpose* adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Tujuan memberikan arah dan motivasi dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Tujuan ini meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merancang strategi dalam pengelolaan wisata. Adapun sub indikator terdiri dari misi dan kemampuan sebagai berikut:

1. Misi adalah tujuan utama atau alasan keberadaan suatu organisasi, lembaga, perusahaan, atau individu. Misi menjelaskan apa yang harus dicapai dan mengapa hal tersebut penting. Misi meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun rencana pengembangan dan pemasaran wisata dalam mengelola wisata alam.
2. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kemampuan mencakup keterampilan, pengetahuan, bakat, dan potensi yang dimiliki individu maupun kolektif. Kemampuan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memelihara dan merevitalisasi baik akses jalan maupun wisata alam

2. *Environment* adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup, baik berupa benda hidup maupun benda mati. Lingkungan mencakup berbagai komponen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengkaji dampak potensial lingkungan dalam pengelolaan wisata alam. Adapun sub indikatornya peluang dan sistem dengan sebagai berikut:

1. Peluang adalah situasi atau kondisi yang menguntungkan yang berpotensi memberikan manfaat atau keberhasilan jika

dimanfaatkan dengan baik. Peluang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengidentifikasi ketertarikan wisatawan mancanegara maupun Nusantara pada wisata alam.

2. Sistem adalah kumpulan komponen atau elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menyusun rencana induk pengelolaan wisata alam yang komprehensif, mencakup aspek perencanaan, pengembangan, operasional, dan pemantauan.

3. *Directions* adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan proses memberikan arahan, bimbingan, dan instruksi kepada individu atau kelompok untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Menyusun Pedoman dan Standar Operasional dalam pengelolaan wisata alam. Adapun sub indikatornya ialah koordinasi, motivasi, komunikasi dan perintah dengan sebagai berikut:

1. Koordinasi adalah menyesuaikan tugas atau pekerjaan dengan jalan yang dihubungkan guna menyelaraskan dengan bawahan. koordinasi meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi pedoman, SOP, dan program pengarahannya dalam pengelolaan wisata alam.

2. Motivasi adalah pemberian semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan

secara sukarela. Motivasi meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung barat Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada individu, kelompok, atau organisasi yang berkontribusi signifikan dalam pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan.

3. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi, ide, pesan, atau makna dari satu pihak kepada pihak lain melalui media tertentu. Komunikasi meliputi Pemerintah kabupaten bandung Barat Menggunakan berbagai media komunikasi, seperti penyuluhan, brosur, media cetak, dan media sosial, dengan desain menarik untuk menyebarkan informasi terkait pengelolaan wisata alam.

4. Perintah adalah instruksi atau permintaan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan atau pekerjaan tertentu. Perintah meliputi Pemerintah Bandung Barat memberikan perintah yang jelas, tegas, dan terstruktur melalui peraturan, kebijakan, SOP, sistem perizinan, dan mekanisme koordinasi dalam pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan.

4. *Actions* adalah gerakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Tindakan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengambil tindakan nyata dalam perencanaan, pengembangan, operasional, pelibatan masyarakat, dan pemantauan dalam pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan. Tindakan-tindakan tersebut

akan memastikan keseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya menciptakan wisata alam yang berkelanjutan di wilayah Bandung Barat. Adapun sub indikatornya ialah pengambilan keputusan serta sarana dengan sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan untuk mengatasi situasi atau masalah tertentu. Pengambilan keputusan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan wisata alam melalui mekanisme yang transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta partisipasi masyarakat.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Sarana meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana yang memadai di setiap objek wisata alam, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan pengalaman berkunjung bagi wisatawan, serta mendukung pengelolaan wisata alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. *Knowledge* adalah proses memperoleh atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, sikap, dan preferensi melalui pengalaman, studi,

instruksi, atau pengamatan. Pembelajaran meliputi Pemerintah Kabupaten Barat meningkatkan strategi pengelolaan wisata alam melalui pelatihan, adopsi praktik terbaik, penelitian, pembelajaran dari masyarakat lokal, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Adapun sub indikatornya metode perbandingan dan identifikasi dengan sebagai berikut:

1. Metode perbandingan adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau data untuk mencari persamaan dan perbedaan di antaranya. Metode perbandingan meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan wisata alam, seperti kualitas pengalaman wisata, kepuasan wisatawan, atau dampak lingkungan.

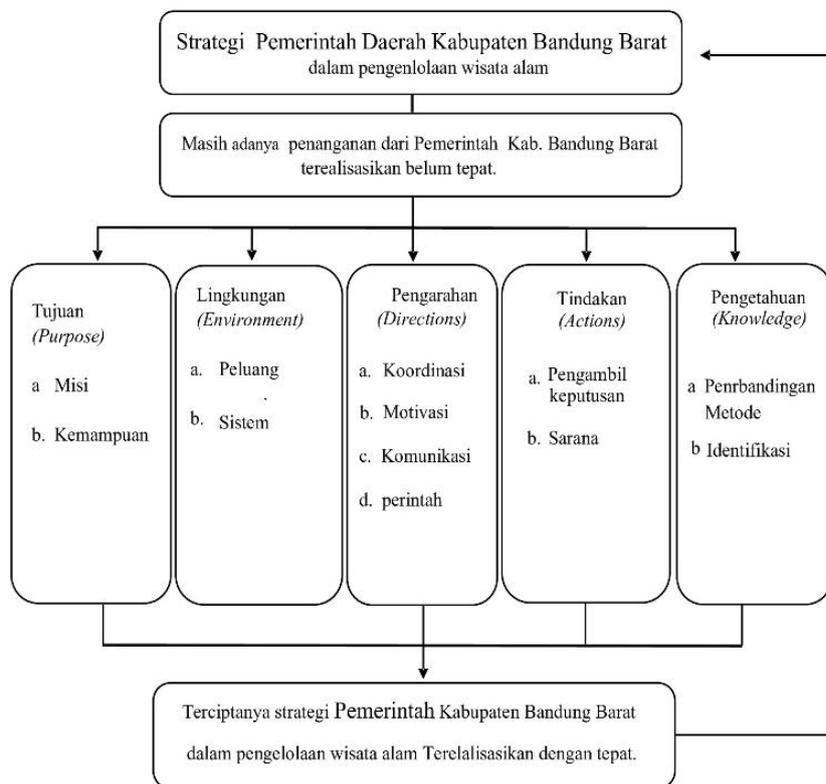
2. Identifikasi adalah proses untuk mengenali, menemukan, dan menentukan sifat, karakteristik, atau keberadaan sesuatu. Identifikasi meliputi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola wisata alam dapat membantu dalam mengukur dan memantau kemajuan strategi pengelolaan wisata alam, serta memberikan informasi yang lebih spesifik dan akurat tentang efektivitas strategi yang digunakan.

Strategi Pemerintah dalam pengelolaan wisata alam yang didasarkan pada *purposes, environment, direction, action, dan learning* pada akhirnya akan tepat strategi dalam pengelolaan wisata alam percepatan dalam

pengembangan infrastruktur, serta meningkatnya wisatawan nusantara dan mancanegara di destinasi wisata alam melalui website.

Berdasarkan uraian diatas,maka penliti menggunakan model kerangka pemikiran ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2024)

2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian diatas maka proposisi penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Wisata Alam, ditentukan oleh indikator Tujuan, Lingkungan, pengarahan, Tindakan dan pembelajaran.